

## Daftar Referensi

### Buku

- Adisasmita, Tjarsim. *Menangani Transaksi Ekspor : Berdasarkan Letter of Credit*. Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant. 2007.
- Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik, Edisi Ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. 2004.
- Amir M.S. *Ekspor Impor: Teori & Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1993.
- Christine. *Tax Fraud: an Emerging Issue for Concern, Economic Business & Accounting Review, Volume II*. Depok: Departemen Akuntansi FE UI. 2007.
- Ebril, Liam, at al. *The Modern VAT*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 2001.
- Elder, Randal J., Beasley, Mark S., dan Arens, Alvin A. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Twelfth Edition*. New Jersey: Pearson Education International. 2008.
- Hutagaol, John. *Perpajakan : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Hutagaol, John., Darussalam., dan Septriadi, Danny. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007.
- Konrath, Larry F. *Auditing : A Risk Analysis Approach, 5<sup>th</sup> Edition*. Canada: South-Western. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Schenk, Alan., dan Oldman, Oliver. *Value Added Tax : A Comparative Approach In Theory And Practice*. New York: Transnational Publishers, 2001.
- Shoup, Carl S., Gillis, Malcolm., dan Sicat, Gerardo P. *Value Added Taxation in Developing Countries*. Washington, D.C.: The World Bank. 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung. 2005.

- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tait, Alan A. *Value Added Tax : International Practice and Problems*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 2001.
- Thuronyi, Victor. *Tax Law Design and Drafting, Vol 1*. Washinton D.C.: International Monetary Fund. 1996.
- Transparansi Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penguatan Landasan Good Governance*. Jakarta: Bagian Organisasi & Tata Laksana Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. 2005.
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007.

### Publikasi Elektronik

- Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan. "Keterangan Pers Presiden: Usai Presentasi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Kinerja Pajak." <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pers/presiden/2008/03/08/341.html>>
- Gunanto ES. "Penerimaan Pajak 2008 di Atas Target." *Tempointraktif.com*. 12 November 2008. <<http://www.tempointraktif.com/hg/ekbis/2008/11/12/brk,20081112-145651.id.html>>
- Yulawati. "Empat Petugas Pajak Kembali Ditangkap". *Tempointraktif.com*. 11 Januari 2006. <<http://www.tempointraktif.com/hg/jakarta/2006/01/11/brk,20060111-72077.id.html>>
- "Dilema Perpajakan: Penerimaan Negara Versus Daya Saing." *Situs Masyarakat Transparansi Indonesia*. 09 Desember 2008. <<http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatkolom&id=34>>
- "Pegawai Bank Ikut Terlibat Ekspor Fiktif: DPR Minta Polisi Segera Investigasi Agen Pelayaran." *Kompas.com*. 20 Januari 2006. <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0601/20/ekonomi/2382122.htm>>
- "Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun." *Kompas.com*. 14 Januari 2006 <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/14/utama/2361311.htm>><<http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/message/579>>

## **Undang-undang dan Peraturan Perpajakan**

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Perlakukan Sebagai Faktor Pajak Standar.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-97/PJ/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Analisa Resiko dalam Rangka Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-176/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-188/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah..

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Perekaman SPT Masa PPN.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/ PJ.53/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/ PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif).

Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-493/BC/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-726/BC/2004 tanggal 4 Nopember 2004.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.